

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dinamika konflik di Laut china selatan (LCS) menjadi lebih kompleks dan sulit untuk di prediksi kedepannya, banyaknya faktor serta aktor negara yang mempunyai kepentingan di Laut China Selatan sehingga menjadikannya suatu kawasan yang sangat strategis untuk di perebutkan. Laut China Selatan ini memiliki kekayaan dasar laut yang dapat memenuhi kebutuhan pangan Asia Tenggara, dan memiliki cadangan minyak sekaligus gas alam yang besar sangat besar (Fajrina Nur Amaliana 2020, 15).

Perairan Laut China Selatan memiliki sumber potensi untuk negara sekitar yang dapat di katakan sebagai “*Red Carpet*” dilihat begitu indah tenang, aman dan tentram ketika tidak ada konflik atau pelanggaran namun berbeda pandangan ketika melihat kedalam karpet merah tersebut, begitu banyak potensi kekayaan, begitu indah pemandangan begitu banyak potensi yang dapat di eksplorasi berbagai negara yang selalu memiliki kepentingannya masing - masing baik dalam sumber daya mineral bahkan sebagai jalur perdagangan, Laut China Selatan memiliki peranannya yang sangat penting sebagai jalur distribusi minyak bumi dan pelayaran internasional.

Data dari Asia Development Bank LCS memiliki 900 Triliun kaki pangkat tiga minyak bumi dan sebagian besar dikirim ke Asia Timur, 266 triliun kaki kubik cadangan gas, serta kekayaan sumber hewani yang sangat melimpah terbukti telah menyumbang 10% perikanan global dengan 504 ribu ton di natuna (Asian Development Bank. 2011).

Banyaknya klaim tumpang tindih dalam penentuan batas maritimnya seperti 12 mil garis pantai, perebutan ZEE dan landas kontinental yang melibatkan beberapa negara seperti China, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Indonesia.

Wilayah Laut Cina Selatan sangat penting: posisinya yang strategis dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan nasional. Secara geografis, Laut Cina Selatan dikelilingi oleh sepuluh negara pantai, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Faktor pendukung bahwa konflik ini menjadi potensi ancaman kedepan yang akan di hadapi oleh Indonesia adalah kenyataan posisi geografis Indonesia yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia bahkan *International Hydrographic Organization* bahwa perairan Laut Cina Selatan merupakan batas ujung barat daya berbatasan pulau Tanjung Berikat dan Tanjung memang di kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan yang merupakan wilayah yuridiksi Indonesia.

Sebagai jalur yang sangat strategis bagi berbagai aspek, Laut Cina Selatan sendiri mencakup dalam lingkup geografis, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di manawilayah sengketa LCS terdapat beberapa pelanggaran atas wilayah dan salah satunya kapal penangkapan ikan dan *Coast Guard China*, permasalahan ini memberikan dampak politik bagi Indonesia dan China yang memiliki potongan ZEE Indonesia di LCS dengan wilayah peta *nine dash line*.

Sejak Perang Dunia ke II Kepentingan China di wilayah Indo-Pasifik

termasuk Laut China Selatan sangatlah besar, dalam segi perekonomian Laut China Selatan serta ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sangatlah menopang ekonomi setiap negara dan setiap negara berhak menjaga teritorinya dengan kekuatan militer (*Security*). Perilaku tindakan China dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan *Illegal fishing* menjadi suatu peluang ekonomi bagi tingkat jumlah penduduk masyarakat China.

Klaim China tanpa dasar yang non-rasional yaitu *Nine Dash Line* membuat Indonesia harus mempersiapkan diri jika akan terjadinya perang terbuka di laut China Selatan. Indonesia di Era Jokowi secara tegas mendeklarasikan se sebagai negara *non climant State* dan tetap patuh terhadap UNCLOS 1982 dengan dasar Hukum Internasional yang telah disepakati bersama.



Gambar 1.1 (Tribunnews 2021).

Sebagai Bagian dari Indonesia, Klaim territorial China membuat Indonesia koko menjaga keamanan dan ketahanan kawasan, karena Indonesia merupakan salah satu wilayah terbesar di ASEAN. Indonesia merupakan pionir kerja sama regional antara ASEAN dengan negara-negara besar lainnya, termasuk China.

Kondisi kembali memanas ketika problematika China dan Indonesia terjadi akibat benturan pandangan antara hak historis garis pantai dengan kesepekatan

hukum internasional UNCLOS 1982 tentang garis laut. Penyebab konflik ini menyatakan bahwa adanya dukungan *Coast guard* China terhadap kedaulatan yuridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen di Kepulauan Natuna, kapal China menghalangi penegakan hukum oleh aparat Indonesia. Pihak China menyatakan bahwa kapalnya tidak melakukan pelanggaran dengan alasan *traditional fishing* alasan tersebut secara nyata memasuki wilayah ZEEI di kepulauan natuna (maritimnews 2016).

Indonesia yang sebagai Negara (*Bargaining Power*) di ASEAN telah mengupayakan berbagai diplomasi untuk mencapai resolusi konflik di Laut China Selatan dengan keikutsertaan Indonesia dalam mengambil tindakan mendorong kepentingan Nasional dalam rangka sistem pertahanan negara serta perannya agar penyelesaian ini tidak sampai ke perang terbuka namun dapat diselesaikan dengan cara damai. (Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit 2019).

Setiap Negara berdaulat atas kepentingannya, Indonesia tetap baik dalam menjalin kerja sama baik dengan China dengan *Claimant state* yang bersamaan dengan klaim China atas LCS. Hal ini disebabkan adanya kepentingan Indonesia sebagai negara yang netral dan tetap berpegang pada strategi damai antar kawasan

Perilaku tumpang-tindih atas klaim tersebut memberikan gambaran atas tindakan kapal China terhadap insiden yang terjadi. *Pertama* pada 22 November 2015 insiden ini terjadi di perairan Natuna di manakapal nelayan China memasuki perairan Indonesia insiden ini tidak terlalu mencekam repon indonesia masih di tahap memberikan peringatan (CNN 2017).

*Kedua* kejadian 2016 di manakapal China melakukan tiga kali dalam

pelanggaran di perairan Indonesia ketika pada Maret 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan bahwa kapal nelayan China memasuki wilayah ZEEI dan melakukan penangkapan *Illegal fishing* tindakan yang dilakukan oleh Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penangkapan kapal nelayan China namun dalam insiden ini Indonesia melepas kapal asing itu karena adanya intervensi kapal penjaga pantai China. Kejadian ketiga pada 27 Mei 2016 nelayan China melakukan tindakan *Illegal fishing* khususnya di Natuna petugas keamanan laut Indonesia dengan tegas menembak kapal nelayan di manakondisinya kapal China menolak dalam melakukan *Illegal fishing*. KKP berhasil melumpuhkan aksi kapal pukat China (DW 2016).

Selanjutnya pada 17 Juni 2016 patroli yang dilakukan kapal Republik Indonesia (KRI) Imam bonjol – 383 menerima laporan pengintaian udara maritime bahwa terdapat 12 kapal nelayan China sedang melakukan penangkapan dan pencurian ikan di perairan Natuna. Dalam insiden ini Indonesia tegas dengan melepaskan tembakan dan mengenai salah satu kapal nelayan milik China (CNN 2016)

Situasi kembali memanas pada Desember 2019 di manakapal nelayan China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mendapat pengawalan oleh *Coast Guard* China. Berdasarkan data dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia BAKAMLA kejadian ini setidaknya terdapat 64 kapal China yang melakukan aktifitas di ZEE Indonesia. (Hastuti, R. K 2020)

**Tabel 1.2 Daftar Pelanggaran China di Kedaulatan Indonesia 2014-2019**

No	Tanggal	Peristiwa
1.	November, 2015	Kapal nelayan China memasuki wilayah ZEE Indonesia.
2.	Maret, 2016	Kapatroli (KKP) Indonesia menangkap kapal nelayan illegal China dan aksi intervensi oleh dua kapal CGC
3.	Mei, 2016	Kapatroli KRI Oswald Siahaan 354 dengan Kapal Gui Be Yu di mana KRI menangkap radar melalui pergerakan kapal asing.
4.	Juni, 2016	Kapatroli menemukan nelayan China mencuri ikan di perairan Natuna ditemukan sebanyak 12 kapal
5.	Desember, 2019	Kepala badan kamanan laut BAKAMLA terdapat 64 kapal nelayan dan intervensi CGC mulai 19-24 Desember dilakukan di Natuna.

Sumber : (Republika.co.id 2020)

Berulang kalinya kapal- kapal melakukan tindakan kecurangan dengan perilaku kapal pukat China masuk ke wilayah laut Indonesia. langkah Jokowi untuk merespon tindakan tersebut dengan menunjukan dirinya pada tanggal 23 Juni 2016 dengan rapat di Kapal Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol – 383 untuk melakukan patroli langsung di mana Presiden Jokowi berdiri untuk melakukan patroli di kawasan wilayah yang sering dilakukan China dalam penangkapan kapal ilegal sikap ini memberikan Indonesia untuk tegas mengeluarkan nota keberatan atas kedaulatan yuridiksi Indonesia.

## 1.2. Pembatasan Masalah

Dalam memberikan cakupan paparan geostrategi Indonesia yang lebih fokus terhadap rumusan masalah yang diteliti, paparan melakukan pembatasan terhadap

masalah yang dirasa perlu untuk dilakukan. Penulisan ini berfokus untuk membahas mengenai geostrategi Indonesia dalam sudut pandang upaya Diplomasi pertahanan serta upaya Indonesia dalam meredam konflik terbuka agar tidak terjadi di Laut China Selatan era kepemimpinan Jokowi periode pertama tahun 2014-2019. Pembatasan ini dibuat menimbang bahwa konflik antar *Climant state* di wilayah Laut China Selatan berpengaruh besar dalam diplomasi pertahanan Indonesia.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka terlihat peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana Upaya strategis Indonesia dalam meredam konflik terbuka di Laut China Selatan era kepemimpinan Jokowi 2014-2019?”.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari skripsi ini bagaimana upaya strategis Indonesia dalam meredam konflik terbuka di Laut China Selatan era kepemimpinan Jokowi berdasarkan diplomasi pertahanan sebagai kekuatan pertahanan maritime Indonesia.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang di manaterdapat sebuah tema yaitu “Geostrategi Indonesia dalam meredam konflik terbuka di Laut China Selatan era kepemimpinan Jokowi 2014-2019” antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi ini dilakukan sebagai pengetahuan paparan mengenai langkah strategis Indonesia dalam tindakan meredam konflik terbuka di LCS.

2. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi Pemerintah serta akademisi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut untuk masalah yang sama.

#### **1.5.1. Manfaat akademis**

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi para akademisi dalam melihat sudut pandang lain mengenai geostrategi Indonesia dalam meredam konflik di LCS serta bermanfaat untuk pengembangan kajian hubungan internasional dalam peran diplomasi pertahanan.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menambah pemahaman berhubungan dengan peran Indonesia dalam menyelesaikan sengketa laut Cina selatan serta gambaran posisi tawar Indonesia dalam peran diplomasi pertahanan yang dilakukan untuk meredam konflik terbuka dan sebagai bahan rujukan para pengambil keputusan untuk mengetahui posisi dan tindakan apa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa di laut China selatan. Penelitian ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di laut China selatan.

### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk memaparkan pertanyaan penelitian ini adalah metode kualitatif yang dianggap cocok untuk menjadi acuan



penyelesaian rumusan masalah. Untuk mencapai suatu tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sugiyono,2016:1)

Menurut Sugiyono (2016:2) pengertian metodologi penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode Penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Dalam pendapat menurut Sunyoto (2013:19) dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah: “suatu urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis. Karena dengan urutan proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari penelitian tersebut.” Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif atau penjelasan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang kredibel (Moeleong 2006).

Pemilihan metode kualitatif sangatlah tepat, sebab peneliti ikut serta dalam peristiwa dan mengikuti proses dalam penyampaian hasil mengenai peran Indonesia dalam meredam Konflik Laut China Selatan. Dalam melakukan metode ini penulis melakukan tahap wawancara terhadap orang-orang yang kredibel dalam bidang pertahanan, hasil dari penelitian kualitatif dapat memaparkan kondisi yang berupa fakta di lapangan yang dapat dijawab secara ilmiah.

### **1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki gambaran, keadaan suatu hal dengan mendeskripsikan sedetail mungkin

penyajian hasil akhir melalui pemaparan dan analisa fenomena dalam kerangka teoritis secara jelas. Penelitian deskriptif dilengkapi dengan data-data dan gambaran jelas mengenai fenomena yang terjadi. Kelengkapan data serta gambaran fenomena tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari studi literature.

Melalui penelitian yang bersifat deskriptif, penulis berusaha menjelaskan dan memaparkan secara jelas bagaimana langkah strategi Indonesia dalam meredam konflik terbuka di Laut China Selatan era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dipengaruhi banyak faktor yang salah satunya ekonomi yang harus di jaga oleh sistem pertahanan (*Security*) sebagai sumber penting dalam melihat posisi Indonesia. Disertai data-data yang berkaitan dengan fakta Diplomasi pertahanan Indonesia dengan China sangat baik dalam meredam konflik terbuka sebagai hasil; dalam mencapai akhir dari penulisan.

#### **1.6.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dimana Hasan menjelaskan data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui penelitian yang diperlukan. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu dengan melakukan teknik wawancara. Sedangkan sekunder berarti data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi keilmuan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel, media cetak dan elektronik (Hasan 2002).

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wawancara kepada Kolonel kavalri Oktaheroe Ramzi seagai Kasubdit Multilateral di Kementerian Pertahanan RI.</li> <li>b) Wawancara kepada Letkol Khusus Imam Suryo sebagai Kasi bantuan kemanusiaan. Di Kementerian Pertahanan RI.</li> <li>c) Wawancara kepada Kolonel Zeni Suggeng sebagai Kasubdit ASIA di Kementerian Pertahanan RI.</li> <li>d) Wawancara kepada Letkol Cba Lamazi sebagai kasi Asia Tenggara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Data terkait respon Indonesia dalam tindakan China atas klaim China di LCS.</li> <li>b) Data terkait bagaimana posisi atau geostrategi China atas sengketa yang telah di lakukan era Jokowi .</li> <li>c) Apa saja tindakan pertahanan Indonesia untuk meresolusi konflik di LCS.</li> <li>d) Apa saja tujuan diplomasi pertahanan yang telah dilakukan Indonesia untuk meredam konflik terbuka.</li> <li>e) Data mengenai strategi diplomasi Indonesia dalam resolusi konflik LCS.</li> </ul>

Sekunder	Studi Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang Strategi pertahanan maritime Indonesia di Laut China Selatan.</li> <li>(b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen yang terkait The Geopolitics of Indonesia Maritime Tritorial Policy.</li> <li>(c) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang Diplomasi Pertahanan Maritim Strategi, Tantangan dan Prospek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Data terkait Peta laut China Selatan.</li> <li>(b) Data terkait perilaku territorial maritime.</li> <li>(c) Data terkait pelanggaran China di kedaulatan Indonesia</li> <li>(d) Data terkait strategi pertahanan di Laut China Selatan.</li> </ul>
----------	---------------	---	---

### 1.6.3. Teknik Validasi Data

Validasi data dalam penelitian sangat penting untuk menguji keabsahan hasil dari kebenaran penelitian yang di lakukan Karena proses pengumpulan data perlu melalui validasi data yang nantinya akan menjadi bahan rujukan peneliti. Validasi yang digunakan peneliti melalui teknik “Triangulasi”.

Menurut (sugiyono 2014) menjelaskan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari beberapa teknik dari sumber data yang telah ada, skripsi ini menggunakan observasi partisipatif, dengan wawancara mendalam diiringi dokumentasi dalam metode kualitatif, temuan data yang valid dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan pada objek yang di teliti.

## 1.7 Sitematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab utama, dalam setiap bab terdapat beberapa sub-bab yang membahas lebih mengkrucut untuk menjabarkan hasil dari rumusan masalah penelitian ini, terdiri atas :

## **BAB 1           PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sitematika penulisan yang menguraikan landasan umum tentang geografi Laut China Selatan serta aktor yang terlibat dalam konflik di dalam sengketa Laut Selatan di manaberisi grafik pelanggaran yang dilakukan China terhadap kedaulatan Indonesia yang jika didiamkan akan berpotensi menjadi konflik terbuka.

## **BAB II           KAJIAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai kajian pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argument utama yang menguraikan teori yang di pakai untuk membantu peneliti dalam menganalisa mendalam mengenai kasus yang di angkat.

## **BAB III         PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi sub-bab pemaparan atas rumusan masalah yang di angkat yaitu Geostrategi Indonesia dalam Meredam Konflik Terbuka si Laut China Selatan 2014-2019 di manaskripsi ini menjelaskan mengenai sengketa Laut China Selatan, kebijakan Internal diselenggarakan melalui Pembangunan postur Pertahanan negara menuju kekuatan pertahanan, peran dan kebijakan eksternal

Indonesia dalam meredam konflik terbuka, Upaya diplomasi Partahanan Indonesia dengan negara sekitar dalam mengurangi agresif China, dan terakhir Strategi dalam meredam konflik klaim wilayah *Illegal fishing* pada Zee Indonesia di perairan natuna.

#### **BAB IV KESIMPULAN**

Penutup berisi kesimpulan yang berisi uraian tentang hasil dan strategi Jokowi dalam meredam konflik terbuka di Laut China Selatan yang di angkat dan data-data yang telah di analisis serta saran atau rekomendasi penulis mengenai penelitian ini.

